

	PENGADILAN NEGERI DEPOK Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Nomor	A.F.07.2026	
		Revisi	-	
	DAFTAR DOKUMEN AMPUH	Tanggal	10 Maret 2026	
	Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong Kota Depok, Jawa Barat 16413	Halaman	1 of 1	

MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

BULAN FEBRUARI 2026

I. LATAR BELAKANG

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan Pengadilan Negeri Depok sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, cara sederhana, akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

III. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi ini meliputi:

- 1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- 2. Waktu pemenuhan;
- 3. Jumlah informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring

1. Jumlah Permohonan Informasi yang diterima

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA
1	ELY RAHMALIA	JL. BELIMBING 1 NO. 1 PSP RT/RW 001/015 SUKATANI, TAPOS, DEPOK	WIRASWASTA	SALINAN NOMOR : 136/Pdt.P/2022/PN.DPK
2	HAMDAN BARUMUN	JL. H. SA'ALIH NO. 63 HARAPAN JAYA, CIBINONG, DEPOK	ADVOKAT	SALINAN NOMOR : 558 K/PDT/2020
3	MARIA SANTHI SETYANINGSIH	CARINGIN TOWN HOUSE NO. 10 RT.RW 003/005 RANGKAPAN JAYA, PANCORAN MAS, DEPOK	SWASTA	SALINAN NOMOR : 386/Pdt.G/2025/PN.DPK
4	M. FADLION RIZALDY	JL. SETIA 2A CLUSTER SETIA RESIDENCE NO. 10 RT/RW 006/004 JATIWARINGIN, PONDOK GEDE, BEKASI	ADVOKAT	SALINAN NOMOR : 37/Pid.B/2025/PN.DPK
5	HERAWATY YOLANI TUMONDO	GRAND CENTER POINT TOWER C 0228	ADVOKAT	SALINAN NOMOR : 235/Pdt.G/2023/PN.DPK
6	HERU	PERUM JATIJAJAR BLOK D2/06 RT/RW 003/012 JATIJAJAR, TAPOS, DEPOK	KARYAWAN SWASTA	SALINAN NOMOR : 90/Pdt.G/2025/PN.DPK
7	MATROJI	JL. SAWI RT 002 RW 005 PONDOK CABE ILIR, PAMULANG,	SWASTA	LEGALISIR SALINAN NOMOR : 55/Pdt.G/2022/PN.DPK, 204/PDT/2023/PT BDG, 2134 K/PDT/2024

		TANGERANG SELATAN		
8	MOHAMAD BHRUL SONI	PERUM JATIJAJAR BLOK D2/06 RT/RW 003/012 JATIJAJAR, TAPOS, DEPOK	KARYAWAN SWASTA	SURAT PENGANTAR PERKARA NOMOR : 360/Pdt.G/2025/PN.DPK
9	ERRY HERMAWAN	KP. BABAKAN RAJA BRANA RT/RW 003/010 CURUG, CIMANGGIS, DEPOK	PENSIUNAN BUMN	SALINAN NOMOR : 199/Pdt.G/2019/PN.DPK

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN YANG DITERIMA		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
SEPENUHNYA	SEBAGIAN		RAHASIA	BELUM DIKUASAI/ SELESAI	LAINNYA
9	-	-	-	-	-

3. Jumlah Informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN
1	Salinan Putusan	9	1 Hari
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
TOTAL		9	1 Hari

Evaluasi

1. Data pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Depok bulan Januari 2026 terdapat 9 (sembilan) orang yang mengajukan permintaan Salinan Putusan dan telah dilaksanakan dengan waktu rata-rata pelayanan selama 1 (satu) hari. Tidak ada permohonan yang ditolak pada periode bulan Februari 2026.

V. KESIMPULAN

Pelayanan informasi Publik di Pengadilan Negeri Depok sudah mengacu pada SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

VI. REKOMENDASI

Agar dalam pelayanan informasi publik secara konsisten tetap berpedoman pada SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Depok periode Februari 2026.

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Depok



Depok, 10 Maret 2026

/Panitera Pengadilan Negeri Depok

Shanty Ekawaty